



## **KETIDAKTEPATAN SASARAN BANSOS KAJIAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DI KOTA MEDAN**

### ***INACCURACY OF SOCIAL ASSISTANCE TARGETTING: A STUDY OF SOCIAL JUSTICE VALUES FOR ALL INDONESIAN PEOPLE IN MEDAN CITY***

**Ahmad Fauzan Hasibuan<sup>1</sup>, Conrad Napitupulu<sup>2</sup>, Difie Syaquila Bilbina<sup>3</sup>**

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan

Email: difiesabina@gmail.com

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 28-11-2025

Revised : 29-11-2025

Accepted : 01-12-2025

Published : 03-12-2025

#### Abstract

*Social assistance programs are a government instrument for improving the welfare of poor and vulnerable communities. However, in Medan City, various cases of inaccurate targeting are still found, characterized by inclusion errors—recipients who are considered well-off still receive assistance—and exclusion errors, where poor residents are not registered as recipients. This condition indicates the suboptimal implementation of the value of "Social Justice for All Indonesian People," as mandated by the fifth principle of Pancasila. This study aims to identify the factors causing inaccurate targeting of social assistance, analyze them from a social justice perspective, and formulate relevant improvement strategies. The research method uses a qualitative descriptive approach through literature studies, policy analysis, and case observations that occurred in several sub-districts in Medan City. The results of the study indicate that inaccurate targeting is influenced by inaccurate data collection, minimal field verification, weak inter-agency coordination, lack of transparency, and potential abuse of authority. The impacts include uneven distribution of aid, increased public dissatisfaction, and decreased trust in the government. This study concludes that improvements to digital-based data collection mechanisms, transparency of recipient data, public oversight, and the application of good governance principles are key to increasing the accuracy of social assistance targets while realizing the value of social justice for all Indonesian people in Medan City.*

**Keywords:** *inaccuracy of targeting, social assistance, social justice*

---

#### Abstrak

Program bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Namun, di Kota Medan masih ditemukan berbagai kasus ketidaktepatan sasaran yang ditandai oleh adanya inclusion error—penerima yang tergolong mampu tetap menerima bantuan—dan exclusion error, yaitu warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagaimana amanat sila kelima Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaktepatan sasaran bansos, menganalisisnya melalui perspektif keadilan sosial, serta merumuskan strategi perbaikan yang relevan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, analisis kebijakan, dan observasi kasus yang terjadi di beberapa kelurahan di Kota Medan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran dipengaruhi oleh pendataan yang tidak akurat, minimnya verifikasi lapangan, lemahnya koordinasi antar-instansi, kurangnya transparansi, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Dampaknya meliputi ketidakmerataan distribusi bantuan, meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, dan menurunnya kepercayaan kepada pemerintah. Kajian ini menyimpulkan bahwa perbaikan mekanisme pendataan berbasis digital, transparansi data penerima, pengawasan masyarakat, serta penerapan prinsip good governance menjadi kunci dalam meningkatkan ketepatan sasaran bansos sekaligus mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Kota Medan.

**Kata Kunci:** Ketidaktepatan Sasaran, Bantuan Sosial, Keadilan Sosial



## **PENDAHULUAN**

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Melalui berbagai program seperti bantuan pangan, bantuan tunai, maupun jaminan sosial lainnya, pemerintah berupaya mewujudkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata sesuai amanat sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Namun, dalam praktiknya, implementasi bansos di berbagai daerah, termasuk di Kota Medan, sering kali menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran. Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata, sementara sebagian lainnya yang tergolong mampu tetap tercatat sebagai penerima. Oleh karena itu, kajian mengenai ketidaktepatan sasaran bansos menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, memahami dampaknya terhadap masyarakat, serta menilai sejauh mana implementasi bansos telah mencerminkan nilai keadilan sosial..

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran bansos di Kota Medan?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran bansos

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat penting, baik dari sisi pemahaman teori maupun praktik di lapangan. Melalui kajian mengenai ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kelurahan Martubung, penelitian ini membantu memperkaya wawasan tentang bagaimana nilai keadilan sosial pada Sila Kelima Pancasila seharusnya diterapkan dalam kebijakan publik.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Bantuan Sosial (Bansos)**

Bantuan sosial (bansos) adalah bentuk dukungan dari pemerintah kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan sosial, kemiskinan, atau kondisi darurat. Tujuan utama bansos adalah membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar agar tetap dapat mempertahankan taraf hidup yang layak. Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai, bantuan pangan, jaminan sosial, atau pelayanan sosial lainnya. Penyaluran bansos juga harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik, bansos dapat membantu menurunkan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Keadilan Sosial dalam Pancasila (Sila ke-5)**

Sila kelima menekankan bahwa seluruh rakyat berhak memperoleh kesejahteraan yang merata tanpa diskriminasi. Konsep keadilan sosial berarti distribusi sumber daya harus diberikan



sesuai kebutuhan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Ketidaktepatan sasaran bansos menunjukkan ketidakseimbangan penerimaan manfaat, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Menurut Notonagoro, keadilan sosial dalam Pancasila mengandung tiga aspek utama: keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif sangat relevan terhadap bansos karena menekankan pemerataan sumber daya berdasarkan kebutuhan, bukan semata-mata kesamaan. Ketidaktepatan sasaran bansos menunjukkan adanya kesenjangan antara kelompok yang membutuhkan dengan kelompok yang menerima, sehingga nilai keadilan distributif tidak terpenuhi.

### **Ketepatan Sasaran**

Konsep ketepatan sasaran merupakan landasan penting dalam program bantuan sosial. Menurut Coady, Grosh, dan Hoddinott (2004), ketepatan sasaran ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan melalui mekanisme seleksi. Terdapat dua jenis kesalahan utama dalam targeting:

1. Inclusion Error – Individu atau rumah tangga yang tidak memenuhi syarat tetapi menerima bantuan.
2. Exclusion Error – Individu atau rumah tangga yang memenuhi syarat tetapi tidak menerima bantuan.

Kedua jenis kesalahan ini mencerminkan ketidakefektifan program. Inclusion error membebani anggaran dan merugikan penerima yang seharusnya lebih membutuhkan. Exclusion error berdampak lebih serius karena kelompok rentan yang seharusnya menerima dukungan justru tidak mendapatkan bantuan, sehingga tujuan program dan prinsip keadilan sosial tidak tercapai.

### **Kerangka Teoretis**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara realitas empiris ketidaktepatan sasaran bansos dengan nilai-nilai normatif yang diatur dalam Pancasila. Fenomena ketidaktepatan sasaran dipandang sebagai permasalahan struktural yang berakar pada kelemahan sistem pendataan, prosedur verifikasi yang kurang ketat, serta minimnya mekanisme pengawasan.

Ketika bansos tidak tepat sasaran, maka terjadi ketidakadilan dalam distribusi bantuan, karena ada warga yang membutuhkan tetapi tidak terbantu, sedangkan warga yang mampu justru menerima manfaat. Ketidakadilan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip keadilan sosial dalam Sila ke-5 Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, setiap kebijakan publik harus mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Dengan demikian, ketidaktepatan sasaran bansos dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila.

Kerangka berpikir penelitian ini kemudian memandu peneliti untuk melihat bagaimana proses pendistribusian bansos berlangsung di lapangan, mengidentifikasi penyebab ketidaktepatan sasaran, serta menjelaskan implikasi fenomena tersebut terhadap prinsip keadilan sosial.



## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji fenomena ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kelurahan Martubung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat penerima maupun non-penerima bansos, aparatur kelurahan, serta pihak yang terlibat dalam proses pendataan. Wawancara ini bertujuan menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kelurahan Martubung, yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena Kantor Lurah Martubung merupakan salah satu kelurahan yang aktif melaksanakan berbagai bentuk bantuan sosial kepada masyarakat, baik bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun program khusus yang bekerja sama dengan pihak lain. Selain itu, kelurahan ini memiliki jumlah penerima manfaat yang cukup besar sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang relevan dan bervariasi terkait pelaksanaan bansos. Hari/Tanggal : Jumat, 21 November 2025.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kantor Lurah Martubung merupakan salah satu unit pemerintahan kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Secara administratif, kelurahan ini memiliki wilayah yang cukup luas, dengan karakteristik sosial masyarakat yang beragam, mulai dari pekerja sektor formal, informal, hingga masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Sebagai institusi pelayanan publik, Kantor Lurah Martubung memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan administrasi, pembinaan kemasyarakatan, fasilitasi program pemerintah, serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dilakukan kepada beberapa warga Kelurahan Martubung yang tidak menerima bantuan sosial (bansos) meskipun menurut mereka kondisi ekonomi sudah layak untuk mendapatkan bantuan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan teknik semi-terstruktur, sehingga warga dapat menyampaikan pengalaman, pendapat, dan perasaan mereka secara lebih bebas.

Sebagian besar warga menyampaikan bahwa mereka pernah mengajukan diri atau berharap tercatat sebagai penerima bantuan, namun hingga saat penelitian dilakukan, mereka belum pernah menerima bantuan apapun. Salah satu warga menyampaikan bahwa ia sudah beberapa kali menanyakan kepada kepala lingkungan terkait mekanisme pendataan bantuan, namun belum mendapatkan kejelasan mengenai alasan tidak masuknya data dirinya sebagai penerima. Warga tersebut menuturkan bahwa ia merasa kebingungan karena tidak mengetahui proses verifikasi yang sebenarnya dilakukan.

Warga lain mengungkapkan bahwa ia pernah melihat petugas melakukan pendataan dari



rumah ke rumah, namun rumahnya tidak didatangi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pendataan masih belum merata atau ada informasi yang tidak sampai kepada masyarakat. Beberapa warga juga menyampaikan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin menuntut atau memaksa mendapatkan bantuan, namun berharap adanya transparansi mengenai apa saja kriteria penerima dan bagaimana alur penentuan keluarga yang dianggap layak.

Sebagian warga mengakui bahwa mereka kurang memahami prosedur administrasi yang perlu dilakukan, seperti apakah mereka harus mengurus rekomendasi RT/RW, apakah harus melapor ke kantor lurah, atau apakah pendataan dilakukan secara otomatis oleh pemerintah. Minimnya informasi yang diterima membuat mereka merasa pasif dan hanya menunggu tanpa kepastian.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga yang tidak menerima bansos cenderung mengalami tiga bentuk permasalahan utama, yaitu: (1) kurangnya pemahaman mengenai alur pendataan bansos, (2) terbatasnya informasi yang mereka terima mengenai persyaratan penerima bantuan, dan (3) tidak adanya kejelasan mekanisme verifikasi yang membuat mereka tidak mengetahui alasan sebenarnya mereka tidak masuk sebagai penerima. Situasi ini menimbulkan rasa kebingungan, ketidakpastian, serta persepsi bahwa proses pendataan belum sepenuhnya merata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Martubung mengenai ketidaktepatan sasaran bantuan sosial (bansos), dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini masih terjadi akibat beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, proses pendataan penerima bantuan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Minimnya pemerataan informasi serta ketidakjelasan mekanisme verifikasi membuat masyarakat kesulitan memahami hak dan prosedur yang harus mereka tempuh.

Kedua, hasil wawancara menunjukkan bahwa warga yang tidak menerima bansos umumnya tidak mengetahui alasan mereka tidak termasuk dalam daftar penerima. Kurangnya transparansi menyebabkan munculnya persepsi bahwa bantuan tidak sepenuhnya sesuai sasaran. Selain itu, sebagian warga juga mengakui kurang aktif dalam proses pelaporan atau tidak memahami langkah administratif yang benar, sehingga pendataan tidak berjalan maksimal.

Ketiga, observasi lapangan menguatkan temuan bahwa pelaksanaan pendataan dan sosialisasi masih belum merata. Proses ini menimbulkan dampak sosial berupa rasa ketidakadilan, padahal bantuan sosial merupakan implementasi dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketidaktepatan sasaran bansos akhirnya menunjukkan bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan program di tingkat kelurahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi, pemerataan informasi, serta penguatan mekanisme verifikasi agar pendistribusian bansos benar-benar tepat sasaran dan mencerminkan keadilan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Bantuan Sosial*. Jakarta:



Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Lembaga Administrasi Negara. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam Penyaluran Bantuan Sosial*. Jakarta: LAN RI.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial. Jakarta: Kemensos RI.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun BPIP. (2020). *Pancasila dalam Tindakan: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.